

## Dekonstruksi Makna Demokrasi Pancasila di Atas Fanatisme Kepertaian (Refleksi Piagam Madinah)

**Wijianto**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Email: [najiyahhilya@gmail.com](mailto:najiyahhilya@gmail.com)

<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>
Demokrasi Pancasila, Piagam Madinah, Fanatisme.	Perjuangan untuk mewujudkan etika politik yang sejalan dengan Pancasila sebagai Demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia nampaknya masih terus berlangsung. Meskipun negeri ini tidak luput dari konflik atau pengkhianatan terhadap hakikat kebebasan, namun kehadirannya mampu menjaga persatuan bangsa yang majemuk ini dari perpecahan sepanjang sejarah berdirinya. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada cita-cita luhur bangsa ini harus bangkit melampaui ekstremisme partai, suku, atau agama untuk menjadi masyarakat yang beradab. Upaya mendasar Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari fanatisme kesukuan, yang dikenal dengan sebutan ummah, diformalkan dengan pengesahan Piagam Madinah. Politik identitas dan fanatisme senantiasa mewarnai kontestasi politik yang merupakan kegiatan rutin lima tahunan sistem demokrasi Indonesia. Menjaga integritas demokrasi mengharuskan ditegakkannya prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yang meliputi kebebasan dan kesetaraan, kedaulatan rakyat, serta pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
<p><i>Corresponding Author:</i> <b>Wijianto</b></p> <p>Email: <a href="mailto:najiyahhilya@gmail.com">najiyahhilya@gmail.com</a></p>	

### Pendahuluan

Demokrasi Republik Indonesia, dalam pandangan Darmihardjo, adalah konsepsi pemerintahan yang berlandaskan pada watak dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan merupakan aktualisasi dari visi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Setiap orang di bawah Demokrasi Pancasila memiliki kebebasan, tetapi bukan tanpa batas, melainkan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban, menurut Yudi Latif. Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia membutuhkan evaluasi yang terus menerus terhadap semua fakta yang ada. Sepanjang sejarah Indonesia, sejak kemerdekaan hingga fase reformasi saat ini, telah terjadi berbagai tindakan yang merusak dan mendiskreditkan konsep demokrasi. Dari berbagai sudut pandang, Piagam Madinah yang merupakan konstitusi modern pertama di dunia dan keterbukaan

Pancasila, yang didasarkan pada cita-cita tinggi penduduk Indonesia yang beragam dan kosmopolitan, dapat hidup berdampingan secara damai.<sup>1</sup>

Prinsip-prinsip politik dan sosial yang digariskan dalam konstitusi Madinah, seperti yang dipegang oleh Syafi'i Ma'arif, adalah perwujudan dari prinsip-prinsip sosial yang digariskan dalam Al-Qur'an. Menurut Zuhairi Misrawi, upaya konstitusional Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari fanatisme etnis dan bercirikan sebutan universal, umat, adalah dengan diberlakukannya Piagam Madinah. Prinsip-prinsip toleransi, kesetaraan, perdamaian, dan *ukhuwah islamiyah* dipertahankan dengan cara ini. Seorang nasionalis yang percaya pada demokrasi, konsultasi, dan penghapusan perbudakan dan tirani, Sa'id Nursi datang dengan konsep *siyasah syariyah*. Fondasi negara yang kuat haruslah berupa aliran ide yang bebas dari satu orang ke orang lain melalui diskusi dan perdebatan, serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan di antara semua pejabat pemerintah, pegawai pengadilan, dan pelaku hukum. Politik tanpa nilai, menurut Nursi, tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali mengakhiri eksistensi manusia.<sup>2</sup>

Sebagai hasil dari sistem demokrasi yang telah diberlakukan, setiap lima tahun sekali harus ada kontestasi politik untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi ini tidak dapat diabaikan. Terutama dengan adanya ketentuan dalam UU No. 42/2008 bahwa para calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan verifikasi administratif dan faktual agar dapat mencalonkan diri. Selain itu, agar memenuhi syarat untuk mencalonkan kandidat presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden berikutnya, sebuah partai politik atau koalisi partai harus mendapatkan dua puluh persen kursi DPR atau dua puluh lima persen dari total suara. Terlepas dari kredensial dan catatan prestasi seorang kandidat,

---

<sup>1</sup> Zuhairi Misrawi, *Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan keteladanan Muhammad SAW* (Penerbit Buku Kompas, 2009).

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat dan Suwanto Suwanto, "Etika Sosial Islam dari Masa Nabi Muhammad di Madinah dan Relevansinya dengan Politik Indonesia Modern," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (2020): 124-41.

partai-partai politik kini memegang kendali atas proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, kerangka kerja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 membuat seseorang, terlepas dari kehebatan atau prestasinya, tidak mungkin mencalonkan diri sebagai presiden tanpa menggunakan proses ini.<sup>3</sup>

Pada era Rezim Modern dan Pasca-Orde Baru, fanatisme di dalam partai politik pertama kali muncul, dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai satu-satunya partai yang berorientasi Islam. Dua partai patriotik lainnya di Indonesia adalah Partai Golkar (Partai Golongan Karya) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai Golkar menganjurkan sentrisme, sementara PDI mempromosikan Pancasila. Pada saat ini, kaum Muslim tampaknya tidak memiliki banyak pilihan selain bergabung dengan PPP, sementara kaum nasionalis lebih cenderung memilih PDI dan Golkar. Dominasi Muslim di Jepara, seperti halnya di kota-kota lain di mana fanatisme partai Islam merajalela, mendorong mereka untuk memilih PPP dalam setiap kampanye dan calon presiden dari PPP. Ada corak fundamentalisme partai dalam praktik ini, meskipun secara hukum sah karena setiap kota memiliki hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden dan wakil presiden.<sup>4</sup>

Untuk mencegah tindakan yang merusak esensi demokrasi, perlu untuk tetap waspada dalam menghadapi potensi ekstremisme partai, etnis, atau agama. Perlu diingat bahwa keragaman dan multikulturalisme masyarakat Indonesia tercermin dalam pembentukan demokrasi berbasis Pancasila. Karena komponen sosial Madinah konsisten dengan penggambaran budaya Indonesia, terutama dalam hal keberagaman. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam Madinah kemudian memberikan gambaran tentang Islam sebagai agama yang

---

<sup>3</sup> Sumono Sh, "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berbasis Sistem," dalam *Seminar Nasional "Tenaga " Perlindungan Kesehatan "*, Universitas Islam Batik Surakarta, 2017), <https://www.neliti.com/id/publications/171601/>.

<sup>4</sup> M. Rizal Qosim, "Ekstremisme Republikan Islam: Ideologi Partai Ka'bah di Jepara Pada Masa Sebelum dan Sesudah Orde Baru," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 1, no. 1 (2021).

menghargai keragaman dan kemajemukan. Oleh karena itu, menempatkannya dalam konteks Indonesia menjadi sangat menarik.<sup>5</sup>

Mengingat masalah fanatisme partai yang terjadi pada setiap pilihan, termasuk dalam pemilihan eksekutif, makalah ini berusaha untuk mengekspos dan menegaskan prinsip-prinsip moral dan cita-cita mengagumkan yang ditemukan dalam Demokrasi Pancasila, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang ditemukan dalam Piagam Madinah.

## Metode

Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber daya perpustakaan, dan artikel ini adalah hasilnya. Penelitian ini memanfaatkan sejumlah publikasi ilmiah dan terbitan berkala sebagai sumber datanya. Di antaranya adalah "*Dinasti Abad Pertengahan dan Pentingnya Etika Pemerintahan Islam yang Dipraktikkan Rasul Muhammad SAW di Indonesia*" (Al-Ijtimai: Public Administration and Social Science: An International Journal, 2022); M. Rizal Qasim: "*Ideologi dan Ekstremisme Republikan Islam dalam Partai Ka'bah Jepara di Bawah dan Sesudah Pemerintahan Baru dan Reformasi*" Majalah Hukum Tata Negara dan Pemilihan Umum Islam (Staatsrecht, 2021)); Umarulfaruq Abubakar, "*Telaah atas Ideologi Demokrasi Soekarno sebagai Presiden dan Badi'uzzaman Sa'id Nursi tentang Siyash Syar'iyah*" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021); Fajar Syarif, "*Sebuah Pemerintahan yang Islami: Ijtihad Ekonomi NU tentang Pancasila*" (Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan, 2019); Amin Mudzakkir, "*Pemerintahan dan Islam di Era Modern*" (Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 2016).

Pendekatan dokumentasi digunakan sebagai cara utama pengumpulan data dalam penelitian ini, karena sumber referensi utama adalah dokumen dan bahan cetak lainnya. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode analisis isi, yang meliputi penelaahan terhadap materi sumber primer subjek. Untuk membangun kredibilitas sebagai hasil penelitian, penulis menyajikan semua bahan secara tidak memihak dan metodis.

---

<sup>5</sup> Misrawi, *Medina*..

## Hasil dan Pembahasan

### *Demokrasi Pancasila*

Menurut catatan sejarah, berdirinya negara ini merupakan hasil dari upaya bersama dari setiap orang Indonesia, bukan hanya beberapa orang saja. Demikian pula, semua pihak yang ada, termasuk kaum Islamis dan nasionalis, terlibat dalam pendirian Dasar Negara Pancasila, yang telah efektif dalam menjaga keutuhan negara ini dalam kemajemukan. Sebagai makhluk sosial dan warga negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menegakkan cita-cita dan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, termasuk kebebasan dan partisipasi semua warga negara dan hak-hak sipil dan politik mereka.<sup>6</sup>

Negara ini selalu menyadari bagaimana kaum Islamis mampu melemahkan pengabdian filosofisnya selama pembentukan Pancasila dan UUD 1945 dengan menghapus kata Islam dari pasal 29 ayat 1 dan klausa yang menyertai sila pertama. ("*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*"). Meskipun, sebagaimana lazimnya negara demokrasi, terjadi diskusi dan perdebatan sengit sebelum penghapusan tersebut. Bahkan dalam diskusi tersebut, Soekarno kalah telak dari Ki Bagus Hadikusumo. Baru setelah Mohammad Hatta menghubungi Teuku Mohamad Hassan, utusan PPKI dari Sumatera, "kalimat" itu dihapus, dan itu terjadi dalam waktu lima belas menit. Kebesaran hati kelompok Islamis menghasilkan penyelesaian dengan kelompok nasionalis pada saat itu, yang memungkinkan negara untuk tetap bersatu meskipun wilayah Timur menentang Konstitusi. Dengan cara ini, negara yang beragam ini tetap bersatu, dan Pancasila lahir dari komitmen terhadap kesetaraan dan hak <sup>asasi</sup> manusia.<sup>7</sup>

Demokrasi adalah gerakan politik yang genting jika tidak dilandasi dan ditanamkan dengan pola pikir kebangsaan yang dibangun di atas cita-cita besar para pendahulu bangsa. Dalam upaya untuk mengurangi pengaruh partai politik

---

<sup>6</sup> "Telaah Komunisme Pancasila dari Masa ke Masa | Sudrajat | Mozaik: Kajian Sejarah," diakses pada 22 November 2023, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/10763>.

<sup>7</sup> "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah | Sudrajat | Mozaik: Kajian Sejarah."

terhadap lembaga kepresidenan, demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi liberal. Namun, di bawah pengawasannya, muncul kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan UUD 45, seperti pengangkatan Presiden Soekarno untuk seumur hidup dan pemecatan anggota DPR berdasarkan hasil pemilu, sehingga pernyataan Syafii Maarif bahwa demokrasi terpimpin tidak lebih dari sebuah sistem politik yang berkedok demokrasi namun tidak memiliki demokrasi yang sesungguhnya adalah wajar. Oleh karena itu, demokrasi harus terus menjadi perwujudan nyata dari kesetiaan pada cita-cita dan prinsip-prinsipnya.

Kemerdekaan Pancasila, menurut Presiden Soeharto, adalah sejenis demokrasi yang dijiwai dan terjalin dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Namun, pemerintahan Orde Baru sebenarnya agak otoriter, misalnya, memberikan 100 kursi (20%) kepada militer di DPR/MPR dan memberikan banyak jabatan penting di kabinet, birokrasi, dan ekonomi. DPR/MPR disebut sebagai organisasi stempel karet pada saat itu, dan sangat mudah untuk melihat alasannya. Menurut Janedjri M. Goffar, situasi ini adalah hasil dari bentuk pemerintahan yang dipilih dan dipraktekkan oleh Indonesia yang tidak jelas.<sup>8</sup>

Setelah rezim Orde Baru runtuh dan era reformasi dimulai, rakyat Indonesia bersatu di belakang cita-cita Demokrasi Pancasila, yang berusaha menegakkan kembali kedaulatan rakyat. Kebebasan dan kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta kedaulatan rakyat, menurut Jimly Asshiddiqie, merupakan prinsip-prinsip yang menurut Said Nursi dapat disejajarkan dengan politik nasionalis Said Nursi, yang mencakup kesetaraan hukum, hak-hak minoritas dan keamanan, keadilan yang menyeluruh, non-diskriminasi meskipun atas nama negara, dan nasionalisme positif yang berakar pada nilai-nilai esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila Reformasi saat ini, yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *Pigam Madinah*, harus menggantikan masa lalu yang memalukan karena mengkhianati makna dan prinsip-prinsip yang baik dari Demokrasi Pancasila dengan pengabdian kepada cita-cita ini.

---

<sup>8</sup> Sh, "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial."

### ***Piagam Madinah (Etika Politik Islam)***

Sebuah budaya baru, umat, tanpa pengabdian kesukuan, akan didirikan melalui upaya yang sah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan melegitimasi Piagam Madinah. Piagam Madinah menggambarkan tatanan politik dan sosial berbasis universalisme Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Yatsrib atau Madinah selama masa hidupnya. Penduduk Madinah, yang sebelumnya terbiasa dengan hubungan nasab (keturunan) dan kesukuan, diberi hubungan spiritual baru (ummah). Maka, kota Madinah saat itu diwarnai dengan rona baru dan komunitas baru yang tercakup dalam baiat agama, yang meliputi orang, suku, kota, kelompok, dan kebangsaan. Mereka berikrar untuk hidup berdampingan secara harmonis, saling membantu, menghormati, dan menjaga keamanan dari bahaya luar atas nama keyakinan agama yang sama.<sup>9</sup>

Ketika orang-orang berkumpul pada tingkat yang lebih dalam, ini adalah bukti bahwa demokrasi lebih dari sekadar ideologi politik; ini adalah cara hidup yang mewujudkan prinsip-prinsip yang mengagumkan. Ketika menyusun sebuah konstitusi, Nabi Muhammad SAW sering meminta nasihat dari para sahabatnya dan berbicara dengan mereka tentang berbagai topik. Dengan non-Muslim dan komunitas lain, beliau membina persaudaraan dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, Nabi mencontohkan manajemen yang egaliter dan bijaksana. Pada saat Piagam Madinah disusun dan diumumkan, Muhammad saw. telah memantapkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang diakui dan dihormati oleh masyarakat Madinah.<sup>10</sup>

Sebuah ilustrasi dari etika politik Islam adalah budaya dan peradaban yang dibangun oleh Muhammad di Madinah. Menurut pemikir Islam terkenal Al-Ghazali, etika dan moralitas adalah seperti temperamen atau karakter seseorang; keduanya merupakan fondasi yang melandasi setiap tindakan dan sikap seseorang. Dimensi politik hanyalah salah satu dari sekian banyak

---

<sup>9</sup> Hidayat dan Suwanto, "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad pada Periode Madinah dalam Konteks Politik Indonesia."

<sup>10</sup> Misrawi, *Medina*..

penerapan istilah ini. Sebagai hasilnya, seseorang dapat dengan mudah menilai etika politik seseorang dengan melihat cara mereka berperilaku dalam semua aspek kehidupan politik mereka. Di sisi lain, menurut para akademisi salaf, politik pada dasarnya adalah penerapan hukum Islam atas urusan manusia dan alam semesta secara keseluruhan. Kemudian, secara lebih sempit, politik adalah posisi pemimpin, seperangkat hukum dan aturan, atau upaya untuk mencegah bahaya yang akan datang atau menyelesaikan masalah tertentu, dengan melihat konsep politik ini, jelaslah bahwa etika dalam politik adalah bagian yang melekat pada diri manusia. Sebagai monumen prinsip-prinsip demokrasi dan pelestarian kesetaraan, Madinah berdiri tegak.<sup>11</sup>

Seorang pembaharu konservatif yang peduli terhadap pendidikan dan perdamaian, Badiuzzaman Said Nursi adalah seorang politisi Islam terkemuka di Turki yang juga percaya akan perlunya kesetaraan dan keadilan dalam politik nasional. Gagasan kesetaraan merupakan inti dari banyak gagasannya. Karena setiap orang memiliki keahlian yang unik, konsep kesetaraan manusia tidak menyiratkan kesamaan sepenuhnya. Hal ini menyiratkan bahwa orang-orang dari berbagai latar belakang, ras, dan agama harus diakui dan dihargai atas kemampuan, kesuksesan, dan etos kerja mereka. Sebagai seorang ahli teori politik, Said Nursi berpikir bahwa sangat penting untuk membangun kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: keadilan, kebersamaan masyarakat, penolakan terhadap keserakahan, ketaatan kepada Tuhan sebagai pencipta, persaudaraan di antara umat Islam dan agama-agama lain, serta merangkul kebenaran dengan sepenuh hati.

Islam rahmatan lil alamin, seperti yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia, sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, filosofi yang menjadi dasar negara Indonesia. Menurut Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 1983, yang menyoroti filosofi politik nasional NU yang mendamaikan Islam sebagai teologi dan doktrin dengan Pancasila sebagai dasar dan fondasi negara, perspektif ini merupakan gambaran etika politik nasional NU. Memang benar dinyatakan bahwa Pancasila, yang berisi Ketuhanan Yang Maha Esa,

---

<sup>11</sup> Misrawi, *Medina..*



adalah dasar negara, tetapi frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan.<sup>12</sup>

### ***Fanatisme Politik***

Ketika orang menjadi terlalu fanatik, mereka membuat tindakan ekstremisme lebih mungkin berhasil. Seperti aksi organisasi teroris yang melakukan tindakan mengerikan, seperti bom bunuh diri, yang selalu menimbulkan banyak korban jiwa dan merusak ruang publik. Hal ini disebabkan karena, seperti yang dikatakan oleh Winston Churchill, fanatisme membuat seseorang menjadi resisten terhadap ide-ide dan sudut pandang baru, kaku dalam berpikir, dan tidak dapat bergeming dari gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya. Banyak hal yang dapat bekerja sama untuk memicu fanatisme, termasuk ide, media, kelompok (seperti partai politik), dan sebagainya. "Masalah fanatisme kelompok dan agama yang sering berubah menjadi katalisator kekerasan, terutama jika mendekati tahun-tahun politik, masalah ini dapat meningkat, sehingga harus diharapkan," kenang Asisten Komisioner Urusan Agama, yang tidak mengherankan.<sup>13</sup>

Kejadian tragis yang tidak boleh terulang lagi adalah perang Dongos, atau yang juga dikenal dengan sebutan perang Jepara, yang terjadi pada awal reformasi. Sejarah politik Jawa Tengah (termasuk Jepara) berubah menjadi kelam pada 30 April 1999, kurang dari dua bulan sebelum pemilihan umum. Bentrokan hebat terjadi di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, antara massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mengakibatkan tewasnya sedikitnya empat orang dan puluhan orang luka-luka. Bangunan umum dan properti dihancurkan oleh massa yang bertikai, yang dilengkapi dengan arit, parang, ketapel, batu, dan

---

<sup>12</sup> Fajar Syarif, "Ijtihad Politik NU: Negara Pancasila adalah Negara Islam," *The Economic and Cultural Review Alfuad* 3, no. 2 (December 6, 2019): 56–66, <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1625>.

<sup>13</sup> Kementerian Agama, "Penutupan Rakernas Deputy Bidang Urusan : Kita Harus Antisipasi Masalah Fanatisme Golongan di Tahun Politik," diakses pada 24 November 2023, <https://kemenag.go.id/read/tutup-rakernas-wamenag-isu-fanatisme-kelompok-di-tahun-politik-perlu-diantisipasi-zev3g>.

pedang. Setidaknya dua rumah, lima belas kendaraan, dan enam sepeda motor dilalap api, sesuai dengan berita.<sup>14</sup>

Semangat partai yang melanda partai berlambang Ka'bah di antara penduduk Dongos adalah katalisator dari peristiwa tragis dan mengerikan tersebut. Sebuah partai Islam baru, PKB, datang ke kota itu, tetapi penduduk setempat merasa tidak nyaman dan menolaknya (Partai Kebangkitan Bangsa), dan melihat kelompok-kelompok lain yang datang untuk berkampanye sebagai faksi-faksi saingan yang ingin merebut Dongos, yang mereka yakini sebagai milik mereka. Namun, dari sudut pandang ideologi, Goldziher berpendapat bahwa keteguhan partai Ka'bah dalam menegakkan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran dan supremasi mereka atas wilayah Dongos atau Kedung adalah hal yang wajar, masalahnya adalah pendirian mereka terhadap ide tersebut sama sekali tidak beralasan.

Sikap dan perilaku politik setiap elemen partai memiliki dampak yang signifikan, yang berfungsi sebagai alat yang memperburuk fanatisme agama, kesukuan, identifikasi, keturunan, partai, karakter, dan bentuk-bentuk fanatisme lainnya. Konflik ideologis dapat muncul sebagai akibat dari politik identitas yang digunakan oleh setiap elemen partai dalam upaya mereka untuk mendapatkan anggota baru. Konfrontasi ideologis ini memiliki kemampuan untuk memicu perilaku negatif yang tidak terkendali dan menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap perkembangan pandangan yang tidak menguntungkan tentang kelompok lain. Pelajaran yang dipetik oleh bangsa Indonesia dari sejarah penjajahan Eropa seharusnya menjadi pedoman bagi mereka dalam menghadapi realitas baru: realitas negara-bangsa kontemporer. Tidak peduli berapa banyak Muslim yang ada di suatu tempat, kita harus menekankan bahwa Islam adalah agama untuk semua orang. Kita juga harus menghindari fanatisme partai dan politik identitas.

Dalam kerangka bernegara, orientasi kebangsaan Nahdlatul Ulama merupakan salah satu contoh sikap kebangsaan yang sangat baik dari sebuah kelompok Islam. Tawassuth dan I'tidal (seperti bersikap adil, selalu produktif

---

<sup>14</sup> Qosim, "Fanatisme Politik Islam".

dan menghindari segala macam tindakan yang tatharruf, atau berlebihan) adalah cita-cita kebangsaan yang terus mereka junjung tinggi meski menjadi mayoritas dan organisasi Islam terbesar di dunia. Selanjutnya, ada Tasamuh, yang berarti "toleransi". Ini berarti bahwa Anda harus menoleransi pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat Anda sendiri, terutama dalam hal-hal yang tidak Anda setuju mengenai nilai-nilai fundamental. Konsep kedua adalah Tawazun, yang berarti menjaga keseimbangan dalam pengabdian seseorang. Hal ini mencakup pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya serta pengabdian kepada sesama manusia, dengan menyelaraskan kepentingan berdasarkan apa yang dibutuhkan pada saat tertentu. Yang tak kalah penting, kepekaan untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan melarang segala sesuatu yang dapat merusak prinsip-prinsip luhur kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan prinsip Amar Ma'ruf dan Nahy Munkar.<sup>15</sup>

## **Kesimpulan**

Demokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tinggi dan cara hidup bangsa Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang suci, penuh kasih sayang, cerdas, dan adil memiliki kekuatan untuk menyatukan negara kita. Mengkonfirmasi kompatibilitas prinsip-prinsip dan etika yang dibangun dan terus direalisasikan ke dalam budaya demokrasi kontemporer, signifikansinya terhadap Piagam Madinah sangat jelas. Demokrasi sejati di Indonesia adalah demokrasi yang menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, memperlakukan semua kelompok secara setara, dan bekerja sama dalam persaudaraan untuk mewujudkan negara dan bangsa yang modern dan beradab. Sikap persatuan dan persaudaraan harus lebih diutamakan daripada sikap fanatisme. Jika hal ini tidak terjadi, niscaya fanatisme akan memunculkan keyakinan dan praktik-praktik yang merusak prinsip-prinsip demokrasi yang mengagumkan.

---

<sup>15</sup> Syarif, "Ijtihad Politik NU."

## Daftar Rujukan

- Agama, Kementrian. “Tutup Rakernas, Wamenag: Isu Fanatisme Kelompok Di Tahun Politik Perlu Diantisipasi.” Accessed March 24, 2023. <https://kemenag.go.id/read/tutup-rakernas-wamenag-isu-fanatisme-kelompok-di-tahun-politik-perlu-diantisipasi-zev3g>.
- “Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah | Sudrajat | Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah.” Accessed March 22, 2023. <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/10763>.
- Hidayat, Rahmat, and Suwanto Suwanto. “Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia.” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (2020): 124–41.
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Qosim, M. Rizal. “Fanatisme Politik Islam: Ideologisasi Partai Ka’bah Di Jepara Masa Orde Baru Dan Pasca Reformasi.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 1 (2021).
- Sh, Sumono. “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil.” In *Seminar Nasional “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No.36 Tahun 2014”*; Universitas Islam Batik Surakarta, 2017. <https://www.neliti.com/id/publications/171601/>.
- Syarif, Fajar. “Ijtihad Politik Nu: Negara Pancasila Adalah Negara Islam.” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (December 6, 2019): 56–66. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1625>.